

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar di Kota Batu sudah berjalan baik, meskipun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan peraturan walikota baru keluar pada tahun 2013 sehingga Kota Batu masih banyak berbenah guna meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan.

Dalam perjalanannya Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Sekolah Dasar di Kota Batu sedikit banyak telah mendapat sambutan positif. Hal tersebut dapat dinilai dari sikap Pemerintah Kota Batu yang telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Adanya penunjukan 11 Sekolah Dasar guna membuka kelas inklusif di sekolah mereka. Sebelum adanya Peraturan Walikota Batu tentang Pendidikan Inklusif sebenarnya di Kota Batu telah ada 7 Sekolah Dasar yang telah membuka kelas inklusif, dengan adanya penambahan jumlah sekolah yang membuka inklusif diharapkan mampu membuka ruang yang lebih besar bagi anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penambahan dan penunjukan sekolah dasar inklusif baru. Di bentuknya kelompok kerja inklusif (POKJA Inklusif). Diselenggarakannya

sosialisasi kepada Kepala Sekolah Inklusif. Diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pendamping Khusus. Diselenggarakannya deklarasi Kota Batu sebagai Kota Inklusif. Di bentuknya pusat sumber informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Diselenggarakannya Komite Sekolah yang mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif

Komunikasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan sekolah dan masyarakat sudah berjalan cukup baik dan terjalin komunikasi dua arah. Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi, melalui surat edaran, media. Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan di nilai sudah memadai. Sedangkan sumber daya pada tingkat sekolah dinilai masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya jumlah tenaga pengajar. Perekrutan tenaga pengajar masih jauh dari kata ideal hal tersebut dilihat dari kurangnya upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan akan kurangnya tenaga pengajar. Masih mengalami hambatan dalam pendanaan seperti pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan sehingga harus mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan pendanaan.. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut dan tidak mau menyekolahkan anak atau saudaranya di sekolah inklusif

Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif mempunyai beberapa faktor pendukung dan penghambat antara lain:

Faktor Pendukung

1. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan, pihak dan sekolah sudah terjalin cukup baik dan dua arah

2. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses kebijakan tersebut melalui sosialisasi komite sekolah
3. Dinas Pendidikan Kota Batu selaku pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan telah mengeluarkan berbagai upaya seperti selalu berkomunikasi, sosialisasi, koordinasi dan memberikan berbagai program untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif
4. Pihak sekolah memiliki karakter sendiri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, misalnya berpartisipasi aktif dan menjalankan program yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, mensiasati kekurangan tenaga pengajar dan pendanaan yakni dengan bekerjasama dengan psikolog dan universitas serta mencari pinjaman apabila dana BOS belum cair, hal tersebut menandakan bahwa komitmen sekolah untuk memajukan pendidikan inklusif meskipun ditengah keterbatasan dan kekurangan.

Faktor Penghambat

1. Sebagian besar sekolah penyelenggara inklusif kekurangan tenaga pengajar
2. Kekurangan tenaga pengajar berdampak akan terhambatnya proses belajar mengajar dalam kelas.
3. Lulusan ideal dari GPK adalah sarjana pendidikan luar biasa akan tetapi mayoritas GPK bukan lulusan pendidikan luar biasa dan ada juga GPK

yang lulusan SMA sehingga kemampuan dan pengetahuan di nilai masih kurang.

4. Struktur birokrasi sebagai pembagian kerja dan tanggung jawab pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik di sekolah. Ada tumpang tindih jabatan dan kinerja sehingga membuat beban kerja bertambah.

B. Saran

Adapun saran saran membangun dan konstruktif yang dapat diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian:

1. Dinas pendidikan harus jeli dalam melihat masalah, seperti masalah kekurangan GPK. Dinas Pendidikan bisa mencari solusi seperti membantu menambah jumlah GPK. Adanya dana khusus untuk penyelenggaraan inklusif, karena selama ini dana untuk pendidikan inklusif berasal dari dana BOS karena. Sosialisasi yang dilkakukan harus digalakkan kembali karena ada sebagian warga yang tidak paham dan mengerti dan cenderung tidak mendukung, seperti enggan menyekolahkan anak atau saudaranya di sekolah inklusif.
2. Pihak Sekolah harus pro aktif dan tidak tinggal diam apabila di sekolah ada permasalahan seperti kurangnya GPK. Meningkatkan kompetensi GPK, karena GPK berperan dalam proses identifikasi, assesmen, pembuatan kurikulum inklusif, evaluasi dan penilaian bagi ABK
3. Meskipun partisipasi masyarakat sudah dilibatkan melalui komite sekolah akan tetapi peran masyarakat masih sebatas partisipan dan

hanya memberikan masukan sedangkan yang diharapkan masyarakat mampu mengontrol dan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.